

**ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
SUMATRA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

Yohan Saputra

1801120504.P

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**

2020

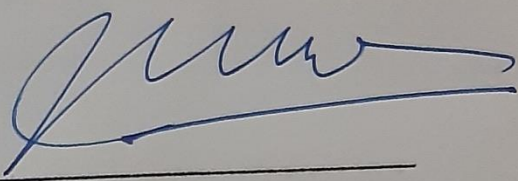
UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

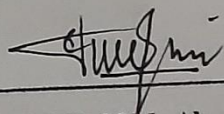
Nama : Yohan Saputra
Nomor Pokok/NIPM : 1801120504.P
Jurusan/Prog. Studi : Ekonomi/Akuntansi
Jenjang Pendidikan : S1 Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAN KOTA DI PROVINSI SUMATRA
SELATAN

Pembimbing Skripsi

Tanggal 19/10/2020 Pembimbing I :


Prof., Dr., H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M
NIDN : 0016035101

Tanggal 19/10/2020 Pembimbing II :


Titi Suelmi, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN : 0025075701

Mengetahui :
Dekan Fakultas Akuntansi



Dr., Msy., Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN : 0205026401

215 / PS / DFE / 20

SURAT PERNYATAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yohan Saputra

Nomor Pokok : 1801120502.P

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang menjiplak karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang,¹⁵ Oktober 2020



Yohan Saputra

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.1.1 Teori Agensi.....	8
2.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan	9
2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	10
2.1.4 Keuangan Daerah.....	11
2.1.5 Indikator Kinerja Keuangan Daerah	13
2.1.6 Analisis Kinerja Keuangan	14
2.2 Rasio Keuangan Daerah.....	15
2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	16
2.2.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	19

2.2.3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	20
2.2.4	Rasio Kesenjangan	21
2.2.5	Rasio Pertumbuhan	23
2.3	Penelitian Lain Yang Relevan.....	24
2.4	Kerangka Penelitian	31

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1	Tempat dan Waktu	34
3.1.1	Tempat Penelitian.....	34
3.1.2	Waktu Penelitian	34
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.1	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3	Populasi, Sampel, Sampling.....	36
3.3.1	Populasi	36
3.3.2	Sampel.....	36
3.3.3	Sampling	37
3.4	Rancangan Penelitian	37
3.5	Variabel dan Definisi Operasional	38
3.6	Instrumen Penelitian.....	40
3.7	Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Provinsi Sumatra Selatan.....	43
4.2	Analisis Keuangan Daerah	34
4.2.1	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018.....	47
4.2.2	Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018.....	52

4.2.3	Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018.....	57
4.2.4	Analisis Rasio Keserasian Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	62
4.2.5	Analisis Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	72
4.2.6	Analisis Rata-Rata Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan tahun 2015-2018	77
4.3	Pembahasan.....	82
4.3.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	82
4.3.2	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	83
4.3.3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	84
4.3.4	Rasio Keserasian Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015- 2018.....	85
4.3.5	Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015- 2018.....	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	18
Tabel 2.2	Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan	19
Tabel 2.3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	21
Tabel 2.4	Penelitian Yang Relevan	26
Tabel 3.1	Variabel dan Definisi Operasional	26
Tabel 4,1	Nama-Nama Kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan	44
Tabel 4.2	Nama-Nama Kota di Provinsi Sumatra Selatan.....	45
Tabel 4.3	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018.....	47
Tabel 4.4	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	50
Tabel 4.5	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018.....	53
Tabel 4.6	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018.....	56
Tabel 4.7	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018.....	58
Tabel 4.8	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	61
Tabel 4.9	Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	63
Tabel 4.10	Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	66
Tabel 4.11	Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	68
Tabel 4.12	Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	71

Tabel 4.13	Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	71
Tabel 4.14	Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	75
Tabel 4.15	Rata-Rata Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2018	77

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatra Selatan	45

ABSTRAK

Yohan Saputra, Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di provinsi sumatra selatan dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini, yaitu Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 13 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota yang terdapat di Provinsi Sumatra Selatan tahun 2015-2018.

Hasil analisis menunjukkan: bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Sumatra Selatan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Kemandirian berada di kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, sedangkan Rasio Efektifitas dengan kriteria sangat efektif dan Rasio Efisiensi pertumbuhan yang positif, sedangkan Rasio Pertumbuhan di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota cenderung mengalami pertumbuhan cenderung negative.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah pada saat ini khususnya di Indonesia semakin pesat pertumbuhan daerahnya dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan di dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, Pasal 4 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan daerah yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012:230). Akuntabilitas keuangan daerah bukan sekedar kemampuan kepala daerah menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013:112).

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan karena ketidakmerataan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Campur tangan pemerintah pusat juga menjadi alasan terhambatnya kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Otonomi daerah dapat membuka jalan yang luas bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan agar dapat mendorong perekonomian daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah yang baik pula. Analisis rasio keuangan daerah dilakukan dengan cara membandingkan hasil

yang dicapai dari suatu periode dengan suatu periode yang lain, dan dapat juga membandingkan antara rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan pemerintah yang lain (Halim, 2012:230).

Pemilihan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sebagai objek penelitian ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota tidak merata. Pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam membangun sarana dan prasarana. Untuk menjangkau pemerataan pembangunan dibutuhkan anggaran yang lebih besar dalam menjangkau wilayah di pemerintah kabupaten tersebut. Dari segi kependudukan, kepadatan penduduk di kabupaten lebih rendah dibandingkan dengan penduduk di kota karena penduduk di wilayah kabupaten tersebar di kota maupun tersebar di desa-desa yang sulit dijangkau karena tidak meratanya pembangunan infrastruktur baik pembangunan jalan maupun jembatan yang menghubungkan antar wilayah tersebut.

Dilihat dari aspek mata pencaharian penduduk, penduduk di wilayah kabupaten umumnya bergerak di sektor pertanian maupun di sektor perkebunan, sementara penduduk di wilayah perkotaan bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Secara administrative Provinsi Sumatra Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota. Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah kabupaten dan pemerintah kota lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi.

Untuk itulah peran masyarakat sangat diperlukan untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. (Halim, 2012:230).

Pengukuran kinerja keuangan daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan tahun 2015-2018?

2. Bagaimana rata-rata kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio keuangan daerah yang terdiri dari Rasio Kemandirian keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, harapan peneliti dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi pribadi peneliti, tetapi juga dapat bermanfaat, khususnya bagi lingkungan Universitas Tridinanti dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu ekonomi di bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di provinsi sumatera selatan. Diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemda, baik jangka pendek maupun jangka panjang..

3. Bagi Penelitian lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan dimasa yang akan datang.

4. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan serta dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Makka, et al.2015. “Analisis Belanj Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Mobagu. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 15 No. 04 Tahun 2015, Hal 324-333.
- Banker, R.D., Patton,J.M., 1987. “*Analytical agency theory and municipal accounting: An introduction and an application*”. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting* 3 (Part B), 29-50.
- Daling, Marcelino. 2013. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Ninahasa Tenggara. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal 82-89.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jensen, M., & Meckling, W. 1976. “*Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*”. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Magdalena, M dan Kurniawan, H, 2013. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Modul Vol. 25, Hal 91-106.
- Mahmudi, 2010, Analisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi Ketiga. Andi, Yogyakarta.
- Natalia, Listiyani dan Astuti, Tutut Dewi. 2015. Analisis Laporan keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Susio-Humaniora Universitas Mercu Buana. Vol.6 No. 1, ISSN ; 2087-1899.
- Oesi, Agustina, 2013. Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurnal Universitas Brawijaya. Hal. 1-10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Vol.7 No.13, Hal. 83-112.

Puspitasari, Ayu Febrianti. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2009. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Hal. 236-248.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian kualitatif. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Suhardi dan Purwanto. 2009, Statiska Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.